



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA SERTA PANITIA PERANCANG UNDANG-UNDANG DEWAN PERWAKILAN
DAERAH REPUBLIK INDONESIA (PPUU DPD RI) DALAM RANGKA
EVALUASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2021**

TANGGAL 15 SEPTEMBER 2021

Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	1 (satu)
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Rabu, 15 September 2021
Pukul	:	13.25 WIB s/d 15.05 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara	:	Mendengarkan pandangan/masukan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021.
Ketua Rapat	:	Supratman Andi Agtas, SH., MH.
Hadir	:	Fisik 21 Orang, Virtual 33 Orang, dan Ijin 1 Orang dari 9 Fraksi.
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Undangan	:	<ul style="list-style-type: none">• 4 orang Pimpinan PPUU DPD RI; dan• Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya;

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM RI serta PPUU DPD RI dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi DR. Supratman Andi Agtas, SH., MH.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat Pukul 13.25 WIB, Ketua rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilakan Menteri Hukum dan HAM RI dan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI untuk menyampaikan pandangan/masukan atas evaluasi pelaksanaan prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021.

II. KESIMPULAN.

Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta PPUU DPD RI dalam

rangka evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 menyepakati/menyetujui hal-hal berikut:

- a. Masukan 3 (tiga) RUU usulan Pemerintah dan 1 (satu) RUU usulan DPR/Baleg dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, yaitu:
 1. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (status carry over/Usulan Pemerintah);
 2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayaran (status carry over/Usulan Pemerintah);
 3. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Usul Pemerintah); dan
 4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Usul DPR/Baleg).
- b. Memasukan 1 (satu) RUU usulan DPR/anggota dalam Prolegnas RUU tahun 2020-2024, yaitu RUU tentang Bahan Kimia (Usul DPR/Anggota).
- c. 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi di Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan usulan DPR/Komisi II masuk dalam RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu :
 1. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Utara.
 2. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Tengah.
 3. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Selatan.
 4. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Tenggara.
 5. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Barat.
 6. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan.
 7. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Timur.

III. PENUTUP.

Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM RI serta Ketua PPUU DPD RI dalam rangka Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 ditutup pukul 15.05 WIB.

Jakarta, 15 September 2021
**An. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

TTD

**WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001**